

MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN ORGANISASI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK MERESPON TUNTUTAN PERUBAHAN DI MASA DEPAN

Oleh : Brigjen. Polri Drs. Bambang Susetyo

I. PENDAHULUAN

Organisasi Polri saat ini perlu secara konsisten dan konsekwen mengembangkan kemampuan untuk merespon tuntutan perubahan yang terjadi di masa depan, baik perubahan yang terjadi di lingkungan internal Polri maupun perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal Polri. Beban tugas dan tanggung jawab anggota Polri untuk mencapai prestasi yang gemilang di masa depan tingkat kesulitannya adalah seperti tingkat kesulitan yang dialami oleh orang pergi ke bulan, dimana beban tugas dan tanggung

jawab Polri akan selalu berubah atau berkembang mengikuti arah perubahan harapan Negara dan masyarakat terhadap prestasi Polri yang dimaksud.

Sasaran dan prestasi yang ingin dicapai Polri di masa depan, mau tak mau harus diorientasikan untuk

memuaskan harapan pihak-pihak yang terkait dengan keberadaan Polri atau yang berkepentingan terhadap keberadaan Polri. Esensi sasaran dan prestasi yang ingin dicapai Polri di era menuju Indonesia Baru dan globalisasi perlu dirumuskan berdasarkan kemampuan internal Polri serta harapan negara dan masyarakat dalam arti luas, maksudnya, sasaran dan prestasi yang dimaksud baik menurut Polri, Negara dan masyarakat.

Supaya tidak muncul persepsi yang beraneka ragam terhadap sasaran dan

... Reaksi yang perlu dan harus segera diambil oleh pimpinan Polri dan/atau pemerintah Indonesia dalam rangka mengkikis habis gangguan moral pada beberapa anggota Polri, adalah pembentukan institusi baru atau peraturan baru yang secara ketat membatasi dan secara tegas menindak oknum Polri yang terbukti melakukan penyimpangan terhadap : hukum, etika moral, sikap mental dan perilaku lainnya yang berkontribusi negatif terhadap citra Polri, Bangsa dan negara ...

prestasi yang ingin dicapai Polri, maka sasaran dan prestasi yang dimaksud harus diberi alat ukur yang jelas dan disosialisasikan atau jangan lagi bernuansa "konsep" supaya orang tidak terlalu bebas untuk memberikan penilaian menurut kehendaknya sendiri-sendiri. Implikasinya, sasaran dan prestasi yang ingin dicapai Polisi di masa depan harus : punya alat ukur yang valid dan reliable; dapat dimengerti dan diterima oleh berbagai pihak; dapat menyesuaikan diri dengan perubahan; realistis atau dapat dicapai berdasarkan sumber-sumber yang ada di lingkungan Polri, dan memenuhi kriteria obyektif lainnya.

Perubahan kondisi sistem Pemerintahan dan kondisi masyarakat di masa depan adalah sesuatu yang sulit diprakirakan, karena kondisi dimasa depan belum tentu searah dengan perubahan kondisi yang terjadi sebelumnya (di masa lampau dan sekarang). Oleh karena itu, agar organisasi Polri bisa selalu responsif dan adaptif terhadap berbagai tuntutan perubahan, maka program pengembangan kemampuan organisasi Polri untuk merespon perubahan di masa depan adalah suatu tuntutan yang mendesak. Lamban dalam mengantisipasi dan merespon perubahan akan membuat organisasi Polri semakin jauh dari sasaran dan prestasi yang ingin dicapai, tetapi kalau organisasi Polri sehat, cerdas dan cermat dalam merespon dan mengantisipasi perubahan serta tangkas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, maka sasaran dan

prestasi yang ingin dicapai Polri akan semakin cepat bisa direalisasikan.

Reputasi Polri yang kurang menyenangkan berbagai pihak pada masa lalu dan saat ini, sebagian diantaranya adalah akibat dari kelambanan dan kurang profesional anggota Polri dalam mengantisipasi dan merespon perubahan harapan Negara dan masyarakat. Implikasi strateginya, untuk mengangkat citra dan membangun reputasi baik Polri di masa depan, maka anggota Polri perlu melakukan pengkajian ulang terhadap 5 (lima) permasalahan berikut :

1. Kemanakah sebaiknya sasaran tugas dan tanggung jawab Polri di masa depan?, bagaimana prestasi yang diharapkan oleh Polri seiring dengan harapan Negara dan Masyarakat kepada Polri di masa depan ?,
2. Bagaimanakah model organisasi dan institusi Polri yang harus dirumuskan dan diterapkan Polri sehingga bisa berhasil dengan gemilang dalam mencapai sasaran dan prestasi yang dimaksud dalam butir 1 diatas ?,
3. Hubungan-hubungan baru kepada siapa dan bagaimanakah diperlukan Polri untuk melengkapi model organisasi dan institusi Polri yang dimaksud dalam butir 2, dan untuk mencapai sasaran dan prestasi yang dimaksud dalam butir 1 di atas ?,
4. Bagaimanakah seharusnya peran setiap pimpinan Polri dalam proses : membina hubungan-hubungan baru yang dimaksud dalam butir 3; merumuskan, melaksanakan dan mengendalikan model organisasi serta

institusi yang dimaksud dalam butir 2, dan mencapai sasaran dan prestasi yang dimaksud dalam butir 1 di atas?, dan

5. Pengembangan kemampuan dalam hal atau bidang apakah yang perlu dilakukan organisasi Polri agar mampu merespon perubahan serta memperpendek ketimpangan-ketimpangan yang terjadi dalam peran pimpinan Polri yang dimaksud dalam butir 4, hubungan-hubungan baru yang dimaksud dalam butir 3, model organisasi dan institusi yang dimaksud dalam butir 2, dan realisasi pencapaian sasaran dan prestasi yang dimaksud dalam butir 1 di atas?

II. SASARAN DAN PRESTASI POLRI

Sejalan dengan dinamika perubahan, maka sasaran tugas dan tanggung jawab utama Polri di masa depan adalah merespon perubahan dan memberikan prestasi yang baik dalam hal ketertiban dan keamanan negara serta ketenteraman dan keadaan rasa aman bagi anggota masyarakat. Tuntutan rasa aman baik dari negara ataupun dari masyarakat kepada organisasi Polri, adalah tuntutan yang bersifat dinamis dan berdimensi ganda bahkan tak tertutup kemungkinan untuk saling berbenturan. Apapun alasannya, Polri tidak bisa menghindari dari dinamika dan dimensi ganda tuntutan

yang dimaksud dan Polri tidak dibenarkan untuk mendikotomikan kepentingan keamanan negara dengan kepentingan keamanan dari anggota masyarakat, sehingga Polri benar-benar menjadi penegak supremasi hukum dan menghormati Hak Asasi Manusia (HAM). Fleksibilitas Polri dalam menyelesaikan kasus-kasus yang bertentangan atau berbeda

Reputasi Polri yang kurang menyenangkan berbagai pihak pada masa lalu dan saat ini, sebagian diantaranya adalah akibat dari kelambanan dan kurang profesional anggota Polri dalam mengantisipasi dan merespon perubahan harapan Negara dan masyarakat.

menurut organisasi Polri untuk mempunyai model organisasi dan institusi yang profesional, proporsional, cerdas, cermat dan tangkas sehingga memungkinkan untuk merealisasikan prestasi yang gemilang.

Apabila organisasi Polri ingin profesional, proporsional, cerdas, cermat dan tangkas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, maka organisasi Polri harus menjalin hubungan-hubungan baru dengan berbagai pihak yang bisa secara signifikan (berarti) membantu meningkatkan keberhasilan Polri dalam mencapai sasaran prestasi yang diinginkan oleh Polri, negara dan masyarakat. Hambatan-hambatan yang muncul akibat adanya kekurangan atau penyimpangan dalam proses kepemimpinan Polri harus dengan senang hati direspon dan sesegera mungkin disempurnakan oleh pimpinan Polri dan/atau pemerintahan Indonesia, sehingga keterpurukan citra Polri segera bisa diangkat kembali dan tidak me-

rugikan organisasi Polri serta bangsa dan negara secara keseluruhan - I dalam Polri adalah kependekan dari kata Indonesia. Lamban dalam merespon tuntutan tugas dan tanggung jawab; menjalin hubungan baru yang prospektif; dan menyempurnakan proses kepemimpinan, akan berdampak negatif yang panjang terhadap citra dan kerendahan prestasi organisasi Polri. Identifikasi kelemahan Polri adalah lebih baik bila dilakukan oleh Polri sendiri secara jujur dengan bertanya kepada hati nurani dan mencari solusinya akan lebih mudah bila dilakukan oleh Polri sendiri, dengan sesuai dengan Sumpah atau Janji, doktrin, pedoman hidup dan pedoman kerja anggota Polri.

III. MODEL ORGANISASI DAN INSTITUSI POLRI

Konsep yang diadopsi dalam pembentukan Model organisasi informal Polri selama ini, menurut literatur teori organisasi telah menggunakan model organisasi jaringan, tetapi makna jaringan dalam organisasi Polri cenderung berkonotasi negatif. Asumsi teori organisasi jaringan yakni untuk menerapkan strategi out-sourcing guna memperkuat positioning organisasi, tetapi penerapan model organisasi dalam Polri pada hakekatnya memperburuk citra Polri, contohnya keterlibatan oknum Polri dalam jaringan penyelundupan, judi, narkoba, pengelolaan komputerisasi SIM, STNK dan kolusi dengan rekanan pemasok materiil, fasilitas dan jasa sebagaimana yang sering dimuat dimedia massa dan

menjadi isue masyarakat.

Penerapan model organisasi jaringan yang canggih oleh beberapa anggota Polri di masa lampau dan saat ini yang cenderung memberi manfaat kepada "OKNUM", di era menuju Indonesia Baru perlu dipalingkan orientasinya. Orientasi pemanfaatan model organisasi jaringan di era menuju Indonesia Baru harus diorientasikan pada upaya memberikan manfaat pada keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Polri dalam menjaga ketertiban, keamanan dan keselamatan negara serta memberi rasa aman, perlindungan, pengayoman, pelayanan dan penegakan hukum yang lebih baik kepada anggota masyarakat. Laksana penyakit kanker, model organisasi jaringan yang dilakukan oleh beberapa oknum Polri sudah mengakar keseluruh unsur masyarakat yang tidak peduli terhadap nama baik Polri.

Reaksi yang perlu dan harus segera diambil oleh pimpinan Polri dan/atau pemerintah Indonesia dalam rangka mengkikis habis gangguan moral pada beberapa anggota Polri, adalah pembentukan institusi baru atau peraturan baru yang secara ketat membatasi dan secara tegas menindak oknum Polri yang terbukti melakukan penyimpangan terhadap : hukum, etika moral, sikap mental dan perilaku lainnya yang berkontribusi negatif terhadap citra Polri, Bangsa dan negara. Implementasi dari institusi yang dimaksud harus mempertimbangkan penerapan teori organisasi jaringan, yakni dengan memanfaatkan kontrol sosial serta

dengan memberikan jaminan hukum kepada supemberi informasi.

IV. HUBUNGAN HUBUNGAN BARU POLRI

Betapapun hebatnya seorang manusia atau suatu organisasi, mau tak mau mereka harus mengakui bahwa mereka tidak bisa mencari atau membuat segala sesuatu yang diinginkan, dibutuhkan dan diharapkan tanpa bantuan dari pihak lain. Indikasi seperti ini perlu disadari oleh organisasi Polri, oleh karena itu, dalam proses mencapai sasaran dan prestasi yang diinginkan, organisasi Polri perlu memanfaatkan sumber-sumber informasi yang ada di luar organisasi Polri.

Dalam hal ini, pembentukan jaringan ke luar organisasi Polri perlu diformalkan dalam bentuk kerja sama institusional. Alternatif pihak-pihak yang perlu dipertimbangkan sebagai anggota jaringan, misalnya : Media Massa, Sekolah, Perguruan Tinggi, LSM dan organisasi lainnya yang dipandang prospektif atau bisa berkontribusi positif terhadap keberhasilan Polri dalam mencapai sasaran dan prestasi yang diinginkan oleh Polri, negara dan masyarakat. Norma atau aturan kerja sama dengan pihak luar yang dilakukan Polri, pusat perhatiannya harus terinci sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam hubungan kerja sama yang dimaksud. Guna menjamin kelangsungan hubungan baik dengan pihak yang berkontribusi positif terhadap keberhasilan tugas dan tanggung jawab Polri, maka kerja sama tersebut perlu mempertimbangkan manfaat yang

saling menguntungkan.

V. PERAN PIMPINAN POLRI

Sejalan dengan fungsi atau tugas dan tanggung jawan organisasi Polri yakni memberikan pelayanan, pengayoman, perlindungan dan penegakkan hukum di wilayah negara Republik Indonesia, maka peran para pimpinan Polri perlu dikaji ulang atau ditetapkan ulang. Obsesi para pimpinan Polri di masa depan harus mencerminkan kegigihannya dalam menempati Sumpah atau Janji Polri Tribrata dan Caturprasyatya serta memberikan "teladan yang baik" kepada berbagai pihak selama mereka menjadi anggota Polri. Seandainya Polri mempunyai pimpinan yang ideal seperti yang dimaksud di atas, maka dalam kurun waktu satu atau dua periode kepemimpinan Polri maka citra dan reputasi baik Polri akan terangkat tinggi-tinggi dan kesan masyarakat bahwa Polri cenderung berhimpit dengan penjahat akan berpaling haluan ke arah kondisi simpatik terhadap Polri.

Para Pemimpin Polri adalah manusia dengan segala kelebihan dan kekurangannya yang bernuansa relatif, oleh karena itu, alangkah indahnya bila kepemimpinan Polri dimasa depan menerapkan model menejemen yang partisipatif dan kepemimpinan yang persuasif dan terbuka terhadap kritik yang membangun seperti Presiden kita (GusDur) saat ini, serta punya kepribadian yang jujur dan tidak tercela selama menjadi anggota Polri. Ongkos atau biaya sosial yang akan ditanggung oleh Polri, negara dan masyarakat

Indonesia dalam bidang ketertiban dan keamanan akan sangat tinggi, bila para pimpinan polri tidak secara konsekwen dan konsisten bertingkah laku seperti kata-kata Sumpah dan Janji Polri Tribrata dan Caturprasetya serta berobsesi menjadi "teladan dan panutan" dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Polri. Landasan yang dapat dipakai sebagai tolok ukur menilai derajat "keteladanan dan panutan" dari para pimpinan Polri yang dimaksud harus obyektif (dengan bukti-bukti konkrit), sehingga pengaruh sentimen atau rasa subyektif bisa diminimalkan.

VI. PENGEMBANGAN KEMAMPUAN ORGANISASI POLRI

Adalah suatu tuntutan yang tidak bisa ditawar oleh organisasi Polri, bahwa organisasi Polri dimasa depan harus adaptif (mampu beradaptasi) dan responsif (mampu merespon) perubahan tuntutan tugas dan tanggung jawab organisasi Polri yang diakibatkan oleh perubahan, baik yang diakibatkan oleh perubahan di lingkungan internal Polri maupun yang diakibatkan oleh perubahan di lingkungan eksternal Polri.

Visi, misi (jati diri) dan paradigma baru Polri - Polri mandiri - hendaknya tidak dipandang sebagai filsafat yang bernuansa angan-angan diubun-ubun, tetapi harus merupakan jati diri dari setiap anggota Polri kapanpun dan dimanapun mereka berada. Implikasi dari pernyataan visi, misi dan paradigma baru Polri tersebut menuntut berbagai pengembangan kemampuan sumber-sumber (sarana dan prasarana) didalam

organisasi Polri, sehingga organisasi Polri selalu memapu merespon berbagai perubahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Polri. Norma dan budaya organisasi yang perlu dikembangkan oleh Polri agar mampu mengantisipasi perubahan dimasa depan adalah budaya organisasi yang merupakan hasil dari interdependensi dan kombinasi dari : strategi, struktur, sistim imbalan jasa, keahlian menejemen, gaya kepemimpinan, ke-trampilan staf, dan nilai kebersamaan.

VII. PENUTUP

Batas-batas sasaran dan prestasi yang harus dicapai serta tugas dan tanggung jawab Polri dimasa depan sangat berkaitan dengan tuntutan kondisi dimasyarakat dan sistem pemerintahan, oleh karena itu, tak ada pilihan lain dari organisasi Polri selain melakukan pengembangan daya respon dalam berbagai perubahan yang mungkin terjadi.

Sejalan dengan uraian diatas serta dalam rangka membentuk organisasi Polri yang profesional dan proporsional diharapkan dengan cerdas, cermat dan tangkas dalam merespon berbagai kondisi yang kemungkinan akan terjadi dimasa depan, maka kebijakan dan program organisasi Polri perlu diorientasikan pada pengembangan : kemampuan untuk merespon arah perubahan, model organisasi dan institusi, menjalin hubungan dengan pihak luar, keteladanan yang baik dari pimpinan dan petinggi Polri, serta sumber-sumber (sarana dan prasarana) organisasi Polri. ■